

Kajian Kedudukan dan Peran Kabupaten Aceh Barat Daya dalam Sistem Perkotaan dan Perkonomian Nasional

Rifani Nasron, Issana Meria Burhan

International Centre for Aceh and Indian Ocean Studies, Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Syiah Kuala

Email: Rifani.nasron@acehresearch.org, Issana.burhan@unsyiah.ac.id

ABSTRACT

Aceh Barat Daya District is part of the flagship region in Aceh Province with potential leading sectors in agriculture, plantations, and fisheries. The economic structure of Aceh Barat Daya District, which is still dominated by the primary sector (agriculture, plantations, livestock), does make this region dependent on outside areas that are directly related to the marketing flow of agricultural and plantation products. However, the productivity of this primary sector still covers the provincial scale, so it cannot be said to be a region with a national economic specialization. This study aims to determine the position and role of Southwest Aceh Regency in the urban system and the national economy. The research method used a quantitative descriptive method. The results showed that in supporting the role of Aceh Barat Daya Regency as the Aceh Andalan Region, it is a priority to develop the south-east zone seaport, namely Susoh Port in Surin Bay as the main port open to foreign trade with the main service types of containers, general cargo, liquid bulk and dry bulk of national and international scope. In addition, there is a shift in economic structure from the primary sector to the secondary and tertiary sectors in Southwest Aceh District.

KEYWORDS: *National Economy, Economic Structure, Economic Shift, GRDP, Urban System.*

ABSTRAK

Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari kawasan andalan di Provinsi Aceh dengan potensi sektor unggulan di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Struktur perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, peternakan) memang membuat daerah ini bergantung pada daerah luar yang berhubungan langsung dengan alur pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Namun demikian, produktivitas sektor primer ini masih mencakup skala provinsi, sehingga belum dapat dikatakan sebagai wilayah dengan spesialisasi ekonomi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui posisi dan peran Kabupaten Aceh Barat Daya dalam sistem perkotaan dan perekonomian nasional. Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mendukung peran Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kawasan Andalan Aceh, maka menjadi prioritas pengembangan pelabuhan laut zona tenggara yaitu Pelabuhan Susoh di Teluk Surin sebagai pelabuhan utama yang terbuka untuk perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama peti kemas, general cargo, curah cair, dan curah kering yang berskala nasional dan internasional. Selain itu, terjadi pergeseran struktur ekonomi

dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier di Kabupaten Aceh Barat Daya.

KATA KUNCI: *Perekonomian Nasional, Struktur Ekonomi, Pergeseran Ekonomi, PDRB, Sistem Perkotaan.*

1. PENDAHULUAN

Dalam sistem perkotaan nasional, Kabupaten Aceh Barat Daya merupakan bagian dari kawasan andalan di Provinsi Aceh dengan sektor unggulan potensial di bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan. Struktur ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya yang masih didominasi oleh sektor primer (pertanian, perkebunan, peternakan) memang menjadikan kawasan ini tergantung pada wilayah di luarnya yang terkait langsung dengan alur pemasaran hasil pertanian dan perkebunan. Namun, produktivitas dari sektor primer ini masih mencakup skala Provinsi, sehingga belum dapat dikatakan sebagai wilayah dengan spesialisasi perekonomian secara nasional. Kedudukan Kabupaten Aceh Barat Daya cukup signifikan dalam aspek pelestarian lingkungan, yaitu sebagai penyedia jasa ekosistem secara nasional maupun global. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana kedudukan dan peran Kabupaten Aceh Barat Daya dalam sistem perkotaan dan perekonomian Nasional.

2. TINJAUAN TEORITIS

Pemerintah menetapkan Kawasan Ekosistem Leuser (KEL) sebagai Kawasan Strategis Nasional dari sudut kepentingan lingkungan hidup melalui PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Peraturan yang sama juga memuat kepentingan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) sebagai Kawasan Lindung Nasional. Menurut Putra (2015), KEL tidak hanya mempunyai fungsi ekologis tinggi namun juga fungsi ekonomi dan estetikanya. Pelestarian KEL selama 30 tahun saja diperkirakan dapat memberi manfaat setara 560 juta dolar Amerika per tahunnya. Konservasi KEL dianggap lebih menguntungkan dibandingkan jika dieksploitasi untuk kegiatan logging, tambang, perkebunan, dan lainnya. Total *economic value* dari KEL dapat dirasakan dalam bentuk penyediaan air, udara bersih, obat-obatan, pencegahan bencana, dan ekonomi masyarakat lokal yang lebih berkelanjutan. KEL bahkan dianggap turut berkontribusi pada keterjaminan penyediaan air bersih hingga ke wilayah timur Leuser di kawasan pusat industri Lhokseumawe, dimana KEL menghasilkan kurang lebih 200,000 milyar kubik air (BPKEL, 2007).

Selain manfaat dalam skala regional, potensi perekonomian dari aspek pelestarian lingkungan KEL di Kabupaten Aceh Barat Daya juga potensial memberi manfaat pada perekonomian nasional. Irawan (2018) memperkirakan karbon di wilayah SPTN VI TNGL mempunyai potensi biomassa lebih dari 10/ton/ha dengan vegetasi yang bervariasi. Kepentingan KEL secara global berpeluang untuk implementasi perdagangan karbon yang dapat mendukung pendanaan pembangunan berkelanjutan dan kegiatan konservasi di wilayah cakupan KEL, termasuk di Kabupaten Aceh Barat Daya. Aliran dana dari perdagangan karbon dapat digunakan untuk mempertahankan penyerapan karbon yang tinggi dengan mengelola hutan lindung, mengendalikan deforestasi, meningkatkan cadangan karbon melalui penanaman tanaman berkayu, pengembangan ekowisata, kegiatan agroforestry, konversi bahan bakar berbasis barang tambang dengan sumber energi yang terbarukan, dan kegiatan ekonomi bernilai tinggi lainnya.

3. METODE PENELITIAN

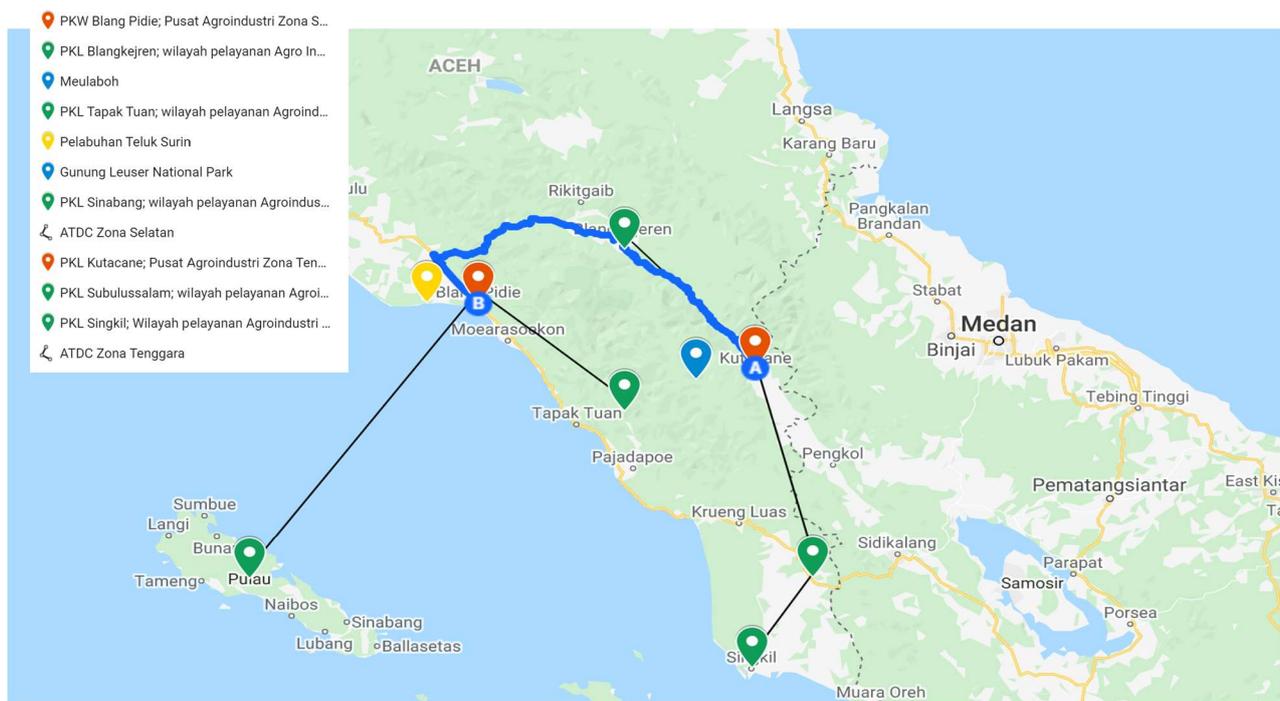
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian pustak, menghitung sector basis bersumber dari PDRB Kabupaten Aceh Barat Daya dan Provinsi Aceh. Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis *Location Quotient* (LQ) sehingga menghasilkan sektor basis di Kabupaten Aceh Barat Daya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan peta google map yang kemudian diolah dan dianalisis dengan ArcGIS.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstelasi ruang wilayah Provinsi, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ibukotanya Blangpidie, merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi bagian dari sistem perkotaan dengan fungsi melayani kegiatan beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya seperti yang dapat dilihat pada Gambar 1. Secara spesifik, RTRW Aceh menetapkan Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai lokasi pusat agro industri zona tenggara-selatan Aceh, melayani Kabupaten Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten Aceh Singkil, Kota Subulussalam, dan Kabupaten Simeulue. Sebagai pusat pelayanan, Blangpidie juga diarahkan menjadi pintu gerbang utama akses dari dan ke luar wilayah Aceh, menjadi sub pusat ekonomi, kebudayaan, pendidikan, pariwisata, transportasi, dan teknologi informasi.

Dalam mendukung peran Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kawasan Andalan Aceh, sangat prioritas untuk dikembangkan pelabuhan laut zona selatan tenggara yaitu Pelabuhan Susoh di Teluk Surin sebagai pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama kontainer, kargo umum, curah cair dan curah kering lingkup nasional dan internasional. Keberadaan pelabuhan akan mendukung sektor unggulan Kabupaten Aceh Barat Daya yaitu sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan, terutama jika didukung dengan pengembangan industri bahan mentah menjadi komoditas yang bernilai tambah. Saat ini, perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya terkendala dengan minimnya industri, baik skala kecil maupun menengah, yang dapat meningkatkan nilai jual bahan mentah.

Pengembangan agroindustri zona Selatan-Tenggara Aceh juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas jalan untuk memperpendek waktu tempuh agar Pelabuhan Teluk Surin menjadi efektif. Terutama untuk melayani PKL Kutacane yang menjadi pusat agroindustri zona Tenggara, saat ini masih membutuhkan waktu perjalanan sekitar 7 jam (252 km) menuju PKW Blangpidie. Sementara, jarak PKL Kutacane menuju PKN Kota Medan hanya 211 km dengan waktu perjalanan 6 jam.



Sumber: Output Google Map diolah (2022)

Gambar 1. Kedudukan Aceh Barat Daya dalam Sistem Perkotaan Nasional dan Provinsi

Ketergantungan Kabupaten Aceh Barat Daya terhadap kebutuhan sandang, pangan, dan papan, membentuk keterkaitan ekonomi dengan wilayah yang lebih luas. Meskipun cukup berdaya dalam menyediakan sebagian pangan dan papan untuk masyarakatnya, kebutuhan sandang masih bergantung pada distribusi barang dari Medan, Sumatera Utara, yang berjarak 435 km dengan waktu tempuh sekitar 11 jam perjalanan darat. Pemenuhan pangan juga masih membutuhkan pasokan dari Kabupaten Aceh Tengah yang berjarak 249 km atau sekitar 7 jam perjalanan darat. Begitu pula dengan pemenuhan kebutuhan sekunder seperti pendidikan, pariwisata, dan rekreasi, membentuk keterkaitan ekonomi Kabupaten Aceh Barat Daya dengan wilayah yang lebih luas. Sarana pendidikan yang bersifat sekunder (sekolah tinggi, akademi, universitas, dan semacamnya) belum tersedia, sehingga penduduk harus melakukan perjalanan, baik untuk menetap maupun untuk komuting, dalam mendapatkannya. Keterikatan kegiatan ekonomi penduduk juga erat dalam hal pemenuhan kebutuhan tersier, seperti kendaraan bermotor, komputer, telepon genggam, dan lainnya. Pengadaan dan distribusi barang-barang ini pada umumnya berasal dari Medan, Sumatera Utara, atau Aceh Barat Daya.

Permasalahan ini juga disebabkan oleh struktur ekonomi Aceh Barat Daya dan pergeserannya. Peningkatan kegiatan ekonomi yang diindikasikan oleh kenaikan PDRB suatu wilayah dapat diperluas (decomposed) atas 3 komponen (Sjafrizal 2008). Secara rinci ketiga komponen tersebut adalah peningkatan PDRB yang disebabkan oleh faktor luar (kebijakan nasional/provinsi) atau sering disebut dengan efek pertumbuhan ekonomi regional (Nij)/ Regional Share (RS). Pengaruh kedua adalah pengaruh struktur pertumbuhan sektor dan subsektor, atau disebut dengan industrial mix-effect (efek bauran industri-Mij)/ Proportional Shift (PS) dan terakhir adalah pengaruh keuntungan kompetitif wilayah studi (Cij)/ Differential Shift (DS).

Melalui ketiga komponen tersebut dapat diketahui komponen atau unsur pertumbuhan yang mana yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Nilai masing-masing komponen dapat saja negatif atau positif, tetapi jumlah keseluruhan akan selalu positif, bila pertumbuhan ekonomi juga positif dan begitu pula sebaliknya

Tabel 1. Hasil Perhitungan ShiftShare Kabupaten Aceh Barat Daya

	PDRB	<i>National Share (Nij)</i>	<i>Proportional Shift (Mij)</i>	<i>Differential Shift (Cij)</i>	Shiftshare (Dij) Nij + Mij + Cij
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	21,58	-0,95	4,92	25,55
B	Pertambangan dan Penggalian	21,58	1,23	-24,38	-1,57
C	Industri Pengolahan	21,58	-15,84	1,38	7,12
D	Pengadaan Listrik dan Gas	21,58	12,80	-8,35	26,03

E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	21,58	33,91	5,62	61,11
F	Konstruksi	21,58	-9,36	25,06	37,29
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,58	-5,83	4,41	20,16
H	Transportasi dan Pergudangan	21,58	-12,97	-21,38	-12,77
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	21,58	26,50	-21,74	26,34
J	Informasi dan Komunikasi	21,58	-10,85	12,34	23,07
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	21,58	8,24	0,70	30,52
L	Real Estate	21,58	12,45	-13,73	20,31
M, N	Jasa Perusahaan	21,58	5,75	-4,62	22,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21,58	5,99	-4,31	23,26
P	Jasa Pendidikan	21,58	25,60	0,44	47,62
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	21,58	9,99	5,71	37,28
R, S, T, U	Jasa lainnya	21,58	8,73	-3,21	27,10

Sumber: Data Sekunder diolah (2022)

Ni,j :Perubahan PDRB sektor i di wilayah Aceh Barat Daya yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh

Mi,j :Perubahan PDRB sektor i di wilayah Aceh Barat Daya yang disebabkan oleh pengaruh pertumbuhan sektor i secara provinsi (Aceh)

Ci,j :Perubahan PDRB sektor i di wilayah Aceh Barat Daya yang disebabkan oleh keunggulan kompetitif sektor tersebut secara provinsi (Aceh)

Di,j :Perubahan PDRB sektor i di wilayah Aceh Barat Daya

Hasil analisis perubahan pertumbuhan sektor PDRB Kabupaten Aceh Barat dalam kurun waktu 2016-2020 yang diperoleh dari hasil penjumlahan tiga komponen menunjukkan bahwa sektor tersier transportasi dan pergudangan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Pada faktanya, Industri transportasi dan penyimpanan di Aceh Barat Daya menempati posisi yang cukup penting dalam PDRB. Penurunan nilai pertumbuhan sektor ini terjadi karena Peranan kategori transportasi dan penyimpanan menurun sedikit pada tahun 2020, di mana kontribusi 5,94 persen di tahun 2019 dan 4,74 persen di tahun 2020.

Selain sektor tersier, kategori pertambangan dan penggalian pada sektor primer juga mengalami penurunan nilai yang cukup signifikan dalam kurun waktu 2016-2020. Hal ini terjadi karena pada faktanya Kabupaten Aceh Barat Daya tidak memiliki Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi; ataupun Pertambangan Batubara dan Lignit (kategori B). Pada kategori ini, subkategori yang berkontribusi terbesar terhadap total PDRB adalah Pertambangan dan Penggalian Lainnya, yaitu sebesar 1,20 persen pada tahun 2020. Kontribusi sub-kategori pertambangan bijih logam tersebut terus mengalami penurunan, dengan kontribusi selama 2016-2020 sebesar 0,16 persen, 0,06 persen, 0,05 persen, 0,04 persen dan 0,05 persen.

Sebaliknya dalam kurun waktu 2016-2020, sektor sekunder kategori Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, serta konstruksi memiliki pertumbuhan tertinggi dibanding sektor-sektor lainnya. Begitupun dengan sektor tersier kategori jasa pendidikan yang memiliki angka pertumbuhan ekonomi kedua tertinggi dibanding sektor lain. Ini artinya di Kabupaten Aceh Barat Daya terjadi pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Konstelasi ruang wilayah Provinsi, Kabupaten Aceh Barat Daya, dengan ibukotanya Blangpidie, merupakan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang menjadi bagian dari sistem perkotaan dengan fungsi melayani kegiatan beberapa kabupaten yang ada di sekitarnya. Saat ini, perekonomian Kabupaten Aceh Barat Daya terkendala dengan minimnya industri, baik skala kecil maupun menengah, yang dapat meningkatkan nilai jual bahan mentah. Pengembangan agroindustri zona Selatan-Tenggara Aceh juga perlu didukung dengan peningkatan kapasitas jalan untuk memperpendek waktu tempuh agar Pelabuhan Teluk Surin menjadi efektif. Terutama untuk melayani PKL Kutacane yang menjadi pusat agroindustri zona Tenggara, saat ini masih membutuhkan waktu perjalanan sekitar 7 jam (252 km) menuju PKW Blangpidie. Dalam mendukung peran Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai Kawasan Andalan Aceh, sangat prioritas untuk dikembangkan pelabuhan laut zona selatan tenggara yaitu Pelabuhan Susoh di Teluk Surin sebagai pelabuhan utama yang terbuka bagi perdagangan luar negeri dengan jenis pelayanan utama kontainer, kargo umum, curah cair dan curah kering lingkup nasional dan internasional.

Kedudukan Kabupaten Aceh Barat Daya dapat ditingkatkan dengan peranan wilayah yang lebih luas melalui penyelesaian pergeseran struktur ekonomi dari sektor primer ke sekunder dan tersier. Untuk mengatasi pergeseran, perlu adanya optimalisasi sektor primer seperti pengembangan agrobisnis berbasis industri pengolahan sektor unggulan, pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, penataan lahan pertanian, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Barat Daya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Mahkamah. (26 Februari 2023). *Citing Internet sources*
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=bpkel>.
- Irawan, P. (2018). Repositori Institusi Universitas Sumatera Utara: Potensi Stok Karbon Hutan Taman Nasional Gunung Leuser Kecamatan Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara.
- Putra, R.H. (2015). Masyarakat Aceh dan Konservasi Kawasan Ekosistem Leuser. *Prosiding Seminar Nasional Biotik: Biologi, Teknologi, dan Kependidikan*, 17-20. Banda Aceh, Indonesia: Biology Education Study Program Faculty of Tarbiyah and Teacher Training Ar-Raniry State Islamic University.
- Republik Indonesia. (2008). Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008. *Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional*. Jakarta, Indonesia.
- Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya. (2023). *Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2033*. Aceh Barat Daya, Indonesia.
- Sjafrizal, 2008. *Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi*. Baduose Media, Cetakan Pertama. Padang.